

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENURUNAN
STUNTING MELALUI INTERVENSI GIZI SPESIFIK DIKECAMATAN
AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
(Studi Kasus Desa Sungai Karias Dan Desa Tangga Ulin Hulu)**

Aina Fitriyah¹, Arif Budiman², Agus Surya Dharma³
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
Email: ainafitriyah0@gmail.com

ABSTRAK

Stunting menjadi ancaman cukup serius bagi anak-anak Indonesia. Salah satu penyebab masalah tumbuh kembang, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan terimplementasi kurang baik. dilihat dari sub variabel Komunikasi terdiri dari indikator Sosialisasi, Kejelasan dan Konsistensi kurang baik. Variabel Sumber daya dilihat dari indikator staf cukup baik, informasi kurang baik, kewenangan dan fasilitas cukup baik. Variabel Sikap pelaksana dilihat dari indikator efek disposisi, tanggung jawab dan empati pelaksana cukup baik. Variabel struktur birokrasi terdiri dari indikator SOPs dan melaksanakan fragmentasi, evaluasi cukup baik, Faktor yang mempengaruhi terdiri dari Faktor pendukung Banyaknya Pihak-Pihak Terkait yang Terlihat serta Berwewenang, Staf yang Bekerja Sudah Sesuai Dengan SOPs, Sudah Ada Pembagian Tugas Kepada Para Pelaksana atau Terlaksananya Fragmentasi dan Melaksanakan Evaluasi Rutin serta Sumber Daya Manusia Yang Cukup, fasilitas yang digunakan mencukupi, Kader yang Lengkap Ketika Ada Kegiatan. Faktor Penghambat meliputi masyarakat kurang Kemudahan Dalam Mendapatkan Informasi, Kurangnya Sosialisasi, Sosialisasi Masih Belum Konsisten Dilaksanakan, Belum Adanya Kejelasan Komunikasi.

Kata Kunci : Implementasi, Stunting, Gizi

ABSTRACT

Stunting is a serious threat to Indonesian children. One of the causes of growth and development problems, this study uses a qualitative method. The results of the study indicate that it is not well implemented. seen from the Communication sub-variable consisting of indicators of Socialization, Clarity and Consistency is not good. The Resource variable is seen from the staff indicator is quite good, information is not good, authority and facilities are quite good. The implementer's attitude variable is seen from the disposition effect indicator, responsibility and empathy, the implementer's empathy is quite good. The bureaucratic structure variable consists of indicators of SOPs and implementing fragmentation, evaluation is quite good, Influencing factors consist of Supporting factors The number of Visible and Authorized Related Parties, Staff Working is in accordance with SOPs, There is already a Division of Tasks to Implementers or the Implementation of Fragmentation and Implementing Routine Evaluations and Sufficient Human Resources, the facilities used are sufficient, Complete Cadres When There are Activities. Inhibiting factors include the community lacking Ease in Obtaining Information, Lack of Socialization, Socialization is Still Not Consistently Implemented, There is No Clarity in Communication.

Keywords: Implementation, Stunting, Nutrition

PENDAHULUAN

Stunting adalah gangguan tumbuh kembang pada anak yang tidak sesuai yang dapat menghambat masa depannya, hal ini kalau dibiarkan terus menurun akan membahayakan sehingga perlu upaya dari berbagai sektor termasuk pemerintah, berbagai regulasi dan program dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dengan harapan anak dapat tumbuh kembang sesuai untuk kesehatannya juga.

Masalah gizi stunting merupakan salah satu masalah gizi yang krusial. khususnya di negara-negara miskin dan berkembang. Stunting merupakan bentuk kegagalan tumbuh kembang yang menyebabkan gangguan pertumbuhan linear pada balita akibat dari akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama, sejak dari masa kehamilan hingga pada usia 24 bulan. Kekurangan gizi pada masa tumbuh kembang anak di usia dini akan menghambat perkembangan fisik, meningkatnya kesakitan. menghambat perkembangan mental anak, dan bahkan menyebabkan kematian. Balita yang mengalami masalah gizi stunting mempunyai risiko terjadinya penurunan kecakapan intelektual, produktivitas, dan kemungkinan risiko mengalami penyakit degeneratif di masa yang akan datang.

Permasalahan gizi saat ini mendapat perhatian khusus yang membutuhkan sinergi dan harus terkoordinasi. Masalah gizi seperti stunting harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan masyarakat itu sendiri, karena masalah ini erat kaitannya dengan kemiskinan, terkait dengan masalah kesehatan pangan di tingkat keluarga, dan melibatkan pengetahuan tentang perilaku hidup sehat. Status gizi masyarakat akan mempengaruhi tingkat kesehatan, usia dan harapan hidup yang merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan

Pencegahan stunting termasuk ke dalam salah satu yang berfokuskan dalam pembangunan kesehatan dikarenakan pertumbuhan di usia dini adalah hal yang penting untuk diperhatikan karena salah satu penyebab dari stunting yaitu bias dilihat dari sumber gizinya atau vitamin. Dengan melihat persentase angka peningkatan stunting, maka saat ini di Indonesia diigencarkan di tiap –tiap daerah dengan berdasarkan pengawasan pemerintah salah satunya yaitu di kabupaten hulu sungai utara.

Jika diperhatikan, angka stunting yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak mengalami penurunan yang signifikan. Padahal pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah sudah berusaha dalam mengatasinya. Salah satunya pemerintah berkomitmen untuk menurunkan angka stunting melalui beberapa kebijakan kesehatan.

Beberapa regulasi di daerah juga telah dibuat untuk penanganan stunting dari perda,perbub, surat edaran dan yang terbaru ialah peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Pengecepatan Penurunan Stunting. Berbagai regulasi telah dibuat dengan sebaik mungkin agar angka stunting di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat membaik dan di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh WHO. Akan tetapi, fakta di lapangan membuktikan jika angka stunting masih tetap tinggi dan tentu hal ini menjadi Tanya besar akan penyebab masih tingginya angka tersebut peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan angka stunting yang masih tinggi di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu Kabupaten dengan kasus stunting yang tinggi pada Provinsi Kalimantan Selatan. Tingginya kasus stunting di kabupaten Hulu Sungai Utara menjadikan acuan pemerintah untuk lebih memfokuskan terhadap keberhasilan pembangunan di kabupaten hulu sungai utara khususnya pembangunan kesehatan. Saat ini Kabupaten Hulu Sungai Utara sedang menggencarkan program pencegahan stunting di tiap-tiap desa.

Desa Sungai Karias dan Desa Tangga Ulin Hulu merupakan desa yang adai di kecamatan amuntai tengah kabupaten hulu sungai utara salah satu kasus angka stunting yang tinggi di antara kecamatan – kecamatan yang lainnya sehingga perlu penanganan khusus untuk mengatasi

permasalahan ini.

Berdasarkan obsevasi awal penulis di tempat penelitian maka di dapat beberapa permasalahan antara lain :

- 1.) Perkembangan sebaran prevalensi stunting di Desa Sungai Karias dan Desa Tangga Ulin Hulu pada tahun 2023 di hitung pada bulan februari dan Agustus dari Desa sungai Karias 296 balita diantaranya 46 balita yang mengalami stunting, sedangkan pada Desa Tangga Ulin Hulu dari 76 balita di antara 10 balita yang mengalami stunting, maka dari itu sulitnya merubah pola asuh orang tua.
- 2.) Kurangnya sosialisasi yang diberikan sehingga menyebabkan masyarakat beranggapan bahwa stunting bukanlah masalah penting, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa tumbuh kembang anak hanya dipengaruhi oleh genetic orang tuanya.(Sumber data : Ibu Asni Mariani)
- 3.) Serta, mutu pelayanan kesehatan yang belum maksimal karena masih terdapat balita bermasalah gizi yang belum memiliki JKN/BPJS kesehatan dan masih ada masyarakat yang kurang minat datang ke Puskesmas atau posyandu terdekat untuk memeriksakan kesehatannya. (Sumber data : Ibu Muna)

METODE

Dalam Penelitian ini penulis melakukan penelitian pendekatan kualitatif adapun Teknik pengumpulan data melalui 3 cara yakni wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui *sampling* informan berjumlah 14 orang. Kemudian ketika data terkumpul lebih lanjut dianalisis dengan teknik meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Langkah terakhir Pengujian kredibilitas data melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi dan *member check*

PEMBAHASAN

Untuk lebih jelas mengenai pembahasan penelitian ini dapat dilihat pada penjelasan dan pembahasan hasil penelitian berikut ini :

1. Komunikasi (Communications)

a. Transmisi / Sosialisasi

Transmisi adalah menyalurkan informasi untuk bertukar pesan dalam suatu pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Desa Sungai Karias dapat disimpulkan bahwa transmisi atau sosialisasi mengenai program pencegahan dan penurunan stunting melalui intervensi gizi spesifik di Desa Sungai Karias masih Kurang baik. Hal ini disebabkan lantaran kurangnya sosialisasi atau informasi terkait dengan program pencegahan dan penurunan stunting melalui intervensi gizi spesifik. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara jelas terkait dengan cara mencegah atau penurunan stunting tersebut.

Sedangkan Desa Tangga Ulin Hulu dapat disimpulkan bahwa transmisi atau sosialisasi mengenai program pencegahan dan penurunan stunting melalui intervensi gizi spesifik di desa tangga ulin hulu masing kurang baik, karena masyarakat masih belum tahu banyak terkait dengan program pencegahan dan penurunan stunting melalui intervensi gizi spesifik yang di jalankan.

Hal tersebut belum sesuai dengan salah satu indikator dari variabel komunikasi teori implementasi kebijakan menurut Edwards III dalam Leo Agustino (2017:136-141) yakni Sosialisasi. Sosialisasi adalah menyalurkan pesan dari pelaksana kebijakan kepada kelompok sasaran, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula dan begitu juga

b. Kejelasan

Komunikasi yang diterima maupun disampaikan harus jelas dan mudah dipahami oleh yang bersangkutan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa kejelasan komunikasi terkait Program Pencegahan dan penurunan stunting melalui intervensi gizi spesifik di

Desa Sungai Karias masih kurang baik. Komunikasi yang dilakukan kepada masyarakat masih kurang jelas dilakukan, sehingga masyarakat belum mengetahui banyak terkait dengan Program Pencegahan dan penurunan stunting melalui intervensi gizi spesifik yang ada.

Dapat disimpulkan bahwa kejelasan komunikasi terkait program pencegahan dan penurunan stunting melalui intervensi gizi spesifik di Desa Tangga Ulin Hulu masih kurang baik, Komunikasi yang jelas hanya terjalin antara kader posyandu dan puskesmas tetapi komunikasi dengan masyarakat kurang jelas dilakukan.

Hal tersebut belum sesuai dengan salah satu indikator dari variabel komunikasi teori implementasi kebijakan menurut Edwards III dalam Leo Agustino (2017:136-141) yakni kejelasan, dimana komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas, dan tidak membingungkan agar implementasi Program Pencegahan dan penurunan Stunting melalui intervensi gizi spesifik di desa Tangga Ulin Hulu dapat berjalan dengan baik.

B. Konsistensi

Konsisten adalah sifat terus menerus yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Desa Tangga Ulin Hulu dapat disimpulkan bahwa konsistensi mengenai Program Pencegahan dan penurunan stunting melalui intervensi gizi spesifik masih kurang baik, karena masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat terkait program tersebut.

Yakni konsistensi, dimana komunikasi yang dilakukan haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dilajalakan) agar implementasi Program Pencegahan dan penurunan Stunting melalui intervensi gizi spesifik dapat berjalan dengan baik.

Hal tersebut belum sesuai dengan salah satu indikator dari variabel komunikasi teori implementasi kebijakan menurut Edwards III dalam Leo Agustino (2017:136-141) yakni konsistensi, dimana komunikasi yang dilakukan haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dilajalakan) agar implementasi Program Pencegahan dan penurunan Stunting melalui intervensi gizi spesifik dapat berjalan dengan baik.

2. Sumber Daya (*Resourches*)

Sumber daya yang penting meliputi staf yang tepat dengan keahlian yang dibutuhkan: informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan terjadi penyesuaian terhadap siapa saja yang terlibat di dalam implementasi kebijakan: kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu dan berbagai fasilitas (termasuk bangunan, peralatan. tanah dan persediaan) di dalamnya untuk kepentingan pelayanan publik

a. Staf

Staf adalah sumber daya manusia yang bekerja dalam mensukseskan dan menjalankan sebuah kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa sumber daya staf atau pelaksana Program Pencegahan dan penurunan Stunting di Desa Tangga Ulin Hulu masih cukup baik, karena kemampuan atau keahlian para staf atau pelaksana Program Pencegahan dan penurunan Stunting sudah merata ,masih ada beberapa Kader yang baru begitu menguasai atau berpengalaman dengan kegiatan-kegiatan Posyandu.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Sungai karias dapat disimpulkan bahwa kemampuan staf atau petugas dalam melaksanakan Program Pencegahan dan penurunan Stunting cukup baik, karena adanya sumber daya manusia yang cukup kegiatan Posyandu berjalan dengan baik .

Dari hasil dokumentasi disimpulkan bahwa prosedur kerja dalam penanganan stunting meliputi:

1. Pemberian suplementasi zat besi folat minimal 90 tablet,
2. Memberikan dukungan kepada ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali,
3. .Memberikan imunisasi Tetanus Toksoid (TT),
4. Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil,
5. Melakukan upaya untuk penanggulangan cacangan pada ibu hamil, dan
6. Memberikan kelambu serta pengobatan bagi ibu hamil yang positif malaria,

7. Program yang menyoasar Ibu Menyusui dan Anak Usia 0-6 bulan termasuk diantaranya mendorong IMD/Inisiasi Menyusui Dini melalui pemberian ASI jolong/colostrum
8. Memastikan edukasi kepada ibu untuk terus memberikan ASI Eksklusif kepada anak balitanya.
9. Kegiatan terkait termasuk memberikan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, Inisiasi Menyusui Dini (IMD), promosi menyusui ASI eksklusif (konseling individu dan kelompok), imunisasi dasar, pantau tumbuh kembang secara rutin setiap bulan, dan penanganan bayi sakit secara tepat,
10. Program lainnya adalah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita Gizi Kurang oleh Kementerian Kesehatan/Kemenkes melalui Puskesmas dan Posyandu.
11. Program terkait meliputi pembinaan Posyandu dan penyuluhan serta penyediaan makanan pendukung gizi untuk balita kurang gizi usia 6-59 bulan berbasis pangan lokal (misalnya melalui Hari Makan Anak/HMA). Anggaran program berasal dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) – Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp. 200.000.000 per tahun per Puskesmas di daerahnya masing masing dan memberikan edukasi kesehatan seksual.”

staf. Sumber daya utama dalam proses implementasi sebuah kebijakan adalah staf atau petugas. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi sebuah kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai atau tidak kompeten dibidangnya.

Hal tersebut sesuai dengan salah satu indikator dari variabel sumber daya teori implementasi kebijakan menurut Edwards III dalam Leo Agustino (2017:136-141) yakni staf. Sumber daya utama dalam proses implementasi sebuah kebijakan adalah staf atau petugas. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi sebuah kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai atau tidak kompeten dibidangnya.

b. Informasi

Informasi adalah sebuah pesan yang berisi tentang sebuah kebijakan atau kegiatan dari suatu proram. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa kemudahan dalam mendapatkan informasi terkait Program Pencegahan dan penurunan Stunting sudah kurang baik, karena memang informasi bisa didapatkan melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, dan Desa serta Puskesmas . Masyarakat juga bisa bertanya langsung kepada para Kader, ada tapi nya masyarakat tidak banyak ikut .

yakni informasi. Apabila informasi masih kurang atau bahkan tidak ada sama sekali diberikan kepada kelompok sasaran, maka kemungkinan akan menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan program yang dijalankan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan salah satu indikator dari variabel sumber daya teori implementasi kebijakan menurut Edwards III dalam Leo Agustino (2017:136-141) yakni informasi. Apabila informasi masih kurang atau bahkan tidak ada sama sekali diberikan kepada kelompok sasaran, maka kemungkinan akan menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan program yang dijalankan.

c. Wewenang

Pada umumnya kewenangan adalah sebuah bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada seseorang. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Desa Tangga Ulin Hulu, dan Desa Tangga Ulin Hulu dapat disimpulkan bahwa wewenang yang diberikan kepada para pelaksana Program Pencegahan dan penurunan Stunting sudah cukup baik, karena pelaksanaan program pencegahan dan penurunan stunting ini banyak melibatkan pihak terkait tak terkecuali masyarakat sendiri.

Desa Sungai Karias dapat disimpulkan bahwa banyak kalangan yang terlibat di dalam pelaksanaan Program Pencegahan dan penurunan Stunting tak terkecuali masyarakat dan para Kader baik itu Kader KPM maupun Kader Posyandu Desa Sungai karias.

Hal tersebut sudah sesuai dengan salah satu indikator dari variabel sumber daya teori implementasi kebijakan menurut Edwards III dalam Leo Agustino (2017:136-141) yakni wewenang. Apabila wewenang itu tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan

d. Fasilitas

Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan membuat kelancaran dalam kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa fasilitas mencukupi dalam program posyandu, fasilitas yang layak untuk digunakan pada anak sehingga kita dapat tau berat badan dan tinggi badan anak agar paham masyarakat dan tidak menyebabkan kesalahan pengkategorian anak penderita stunting atau tidak.

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam menjalankan suatu program. Implementor mungkin memiliki staf, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi program tersebut tidak akan berjalan dengan baik.

Hal tersebut sudah sesuai dengan salah satu indikator dari variabel sumber daya teori implementasi kebijakan menurut Edwards III dalam Leo Agustino (2017:136-141) yakni fasilitas. Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam menjalankan suatu program. Implementor mungkin memiliki staf, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi program tersebut tidak akan berjalan dengan baik.

3. Sikap Pelaksana (Dispositions or attitudes)

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik yang diterapkan. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif dan berjalan sebagaimana mestinya, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi selain itu juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam praktiknya tidak terjadi .

a. Efek Disposisi

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Berdasarkan hasil wawancara observasi dapat disimpulkan bahwa efek disposisi atau sikap pelaksana cukup baik. Hal tersebut disebabkan karena sikap tanggung jawab sebagian Kader cukup baik, sehingga tugas kader menyesuaikan arahan yang diberikan agar kegiatan berjalan dengan semestinya. Oleh karena itu pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana program haruslah orang-orang yang memiliki didikasi pada program yang akan dilaksanakan

. Hal tersebut sudah sesuai dengan salah satu indikator dari variabel sikap pelaksana teori implementasi kebijakan menurut Edwards III dalam Leo Agustino (2017:136-141) yakni efek disposisi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap pelaksanaan program bila personil tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana program haruslah orang-orang yang memiliki didikasi pada program yang akan dilaksanakan

b. Tanggung jawab

Merujuk pada kewajiban seseorang yang harus dijalankan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Desa Tangga Ulin hulu dapat disimpulkan bahwa Tanggung Jawab dalam menjalankan atau melaksanakan program pencegahan dan penurunan stunting melalui intervensi gizi spesifik cukup baik, hal tersebut dapat dilihat dari sikap petugas melaksanakan tanggung jawab semaksimal mungkin agar pelaksanaan sesuai dengan apa yang dijalankan kader dan yang lainnya.

Tanggung jawab yang berarti suatu tindakan yang dapat menjadikan tanggung jawab untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam melaksanakan program

Hal tersebut sudah sesuai dengan salah satu indikator dari variabel sikap pelaksana teori implementasi kebijakan menurut Edwards III dalam Leo Agustino (2017:136-141) yakni Tanggung jawab yang berarti suatu tindakan yang dapat menjadikan tanggung jawab untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam melaksanakan program.

c. Empati

Empati adalah sikap kepedulian dan penuh perhatian dalam membaca situasi. Hal tersebut sudah sesuai dengan salah satu indikator dari variabel sikap pelaksana teori implementasi kebijakan menurut Edwards III dalam Leo Agustino (2017:136-141) yakni Empati yang berarti suatu tindakan

yang dapat menjadikan perhatian untuk mendukung dan mendapatkan hasil yang maksimal dalam melaksanakan program

1. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic structure*)

Struktur birokrasi sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksanakan atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi.

4. Membuat Standar Operating Procedures (SOP)

a. SOP

SOP adalah prosedur kerja yang harus dipatuhi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi. Desa Sungai Karias dan Desa Tangga Ulin Hulu dapat disimpulkan bahwa para Kader KPM dan Kader Posyandu di masing-masing desa sudah bekerja dengan cukup baik. karena mereka sudah bekerja sesuai dengan prosedur yang ada.

Hal tersebut sudah sesuai dengan salah satu indikator dari variabel struktur birokrasi teori implementasi kebijakan menurut Edwards III dalam Leo Agustino (2017:136-141) yakni membuat Standar Operating Procedures (SOP) yang mana artinya suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pelaksana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

b. Melaksanakan Fragmentasi

Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab agar memberikan kemudahan dalam bekerja. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Desa Tangga Ulin Hulu dapat disimpulkan pembagian tugas baik Kader KPM maupun Kader Posyandu sudah cukup baik, yang mana mereka sudah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan Program Pencegahan dan penurunan Stunting melalui intervensi gizi spesifik di Desa Tangga Ulin Hulu.

Hal tersebut sudah sesuai dengan salah satu indikator dari variabel struktur birokrasi teori implementasi kebijakan menurut Edwards III dalam Leo Agustino (2017:136-141) yakni melakukan fragmentasi yang bertujuan agar implementasi dapat berjalan dengan baik dan lancar

c. Evaluasi

Evaluasi dalam program posyandu adalah proses penilaian yang dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa evaluasi dalam menjalankan program pencegahan dan penurunan stunting cukup baik, hal tersebut karena para posyandu memantau perkembangan balita yang mengalami stunting tiap bulannya.

Hal tersebut sudah sesuai dengan salah satu indikator dari variabel struktur birokrasi teori implementasi kebijakan menurut Edwards III dalam Leo Agustino (2017:136-141) yakni melakukan fragmentasi yang bertujuan agar implementasi dapat berjalan dengan baik dan lancar.

SIMPULAN

Implementasi Program Pencegahan dan Penurunan Stunting Melalui Intervensi Gizi Spesifik di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Studi kasus Desa Sungai Karias dan Desa Tangga Ulin Hulu terimplementasi kurang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari sub variabel Komunikasi terdiri dari indikator Sosialisasi, Kurang baik. Hal ini disebabkan lantaran kurangnya sosialisasi atau informasi terkait dengan program pencegahan dan penurunan stunting melalui intervensi gizi spesifik. Sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui secara jelas terkait dengan cara mencegah atau penurunan stunting tersebut, Kejelasan masih dan Konsistensi kurang baik. Variabel Sumber daya dilihat dari indikator staf cukup baik, karena kemampuan atau keahlian para staf atau pelaksana Program Pencegahan dan penurunan Stunting melalui intervensi gizi spesifik sudah merata terkait program yang dijalankan, informasi kurang baik, karena informasi cuma didapatkan melalui kegiatan sosialisasi dari Puskesmas kepada KPM dan juga kepada Kader Posyandu hanya beberapa masyarakat saja yang tau apa saja informasi

yang diberikan kader, kewenangan cukup baik, karena pelaksanaan program pencegahan dan penurunan stunting ini banyak melibatkan pihak terkait tak terkecuali masyarakat sendiri, fasilitas cukup bai. Variabel Sikap pelaksana dilihat dari indikator efek disposisi baik sehingga bertindak sesuai dengan arahan yang diberikan agar program tersebut terjaln dengan lancar, tanggung jawab cukup baik, hal tersebut disebabkan karena sikap tanggung jawab sebagian kader cukup bertanggung jawab atas apa yang dijalankan sesua, empati empati pelaksana cukup baik, hal tersebut disebabkan para pelaksana lebih memberikan perhatian lebih kepada para anak yang penderita stunting dan memberikan makanan tambahan. Variabel struktur birokrasi terdiri dari indikator Membuat Standar Operating Prosedur dan melaksanakan fragmentasi cukup baik, yang mana mereka sudah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam menjalankan Program Pencegahan dan penurunan Stunting melalui intervensi gizi spesifik, evaluasi cukup baik, hal tersebut karena para posyandu memntau perkembangan balita yang mengalami stunting tiap bulannya Faktor yang mempengaruhi teridiri dari Faktor pendukung Banyaknya Pihak-Pihak Terkait yang Terlihat serta Berwewenang Terhadap Implementasi Program Pencegahan dan penurunan Stunting melalui intervensi gizi spesifik, Staf yang Bekerja Sudah Sesuai Dengan SOPs, Sudah Ada Pembagian Tugas Kepada Para Pelaksana atau Terlaksananya Fragmentasi dan Melaksanakan Evaluasi Rutin serta Sumber Daya Manusia Yang Cukup, fasilitas yang digunakan mencukupi, Kader yang Lengkap Ketika Ada Kegiatan. **Faktor** Penghambat meliputi masyarakat kurang Kemudahan Dalam Mendapatkan Informasi, Kurangnya Sosialisasi, Belum Adanya Kejelasan Komunikasi

DAFTAR PUSTAKA

- Anjasmari, N.M.M. (2022) 'Pelayanan Kesehatan Pasien BPJS Rawat Jalan Pada Puakesmas Mabuun Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong'.
- Anjasmari, N.M.M. (2023) 'KINERJA PEGAWAI PADA UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD) SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(6), pp. 2163–2171.
- Anshari, M.R. (2023) 'ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR KECAMATAN SUNGAI TABUKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Cross-border*, 6(1), pp. 28–41.
- Arlan, A.S. and Aida, N. (2023) 'Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat di Puskesmas Pagat Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah', *Administraus*, 7(2), pp. 38–53.
- Febriadi, H. (2022) 'KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU LANGSUNG DI INDONESIA', *Al Iidara Balad*, 4(2), pp. 34–41.
- Hidayatullah, G.M. (2024) 'PENERAPAN PELAYANAN PRIMA PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), pp. 1219–1229.
- Muhammad Hidayatullah, G. (2021) 'Pelayanan Isbat Nikah Wilayah Kerja Kantor Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1b Kabupaten Hulu Sungai Utara', *Jurnal Niara*, 14(3), pp. 213–223. Available at: <https://doi.org/10.31849/niara.v14i3.7384>.
- Noorrahman, M.F., Rizal, M. and Sairin, M. (2022) 'Peran Administrasi Publik dalam Meningkatkan Kinerja dalam Aspek Kepuasan Kerja pada Pejabat Struktural Akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai Kabupaten Hulu Sungai', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(1), pp. 155–163.
- Noorrahman, M.F. and Sairin, M. (2023) 'ANALISIS KINERJA PEGAWAI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PADA UPT PUSKESMAS RAWAT INAP DANAU PANGGANG

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5475–5481.

Paulina, S. (2021) 'KUALITAS PELAYANAN PENCATATAN NIKAH DIKANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PARINGIN PADA MASA PANDEMI COVID 19', *Al'iidara Balad*, 3(2), pp. 27–39.

Paulina, S. (2023) 'PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI PERNIKAHAN DIKANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), pp. 5431–5439.

Rifani, J. and Febriadi, H. (2021) 'KUALITAS PELAYANAN TERHADAP PELANGGAN PADA PLASA TELKOM AMUNTAI AREA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *INOVATIF*, 3(1).

Setiawan, I. (2022) 'ANALISIS PELAYANAN IGD DALAM MERAWAT PASIEN SUSPECT CORONA VIRUS DI BLUD PAMBALAH BATUNG AMUNTAI', *Al Iidara Balad*, 4(1), pp. 41–48.

Setiawan, I. and Zannah, R. (2022) 'PELAYANAN REHABILITASI PADA KANTOR BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA', *Al Iidara Balad*, 4(2), pp. 22–27.

Urahmah, N. and Andri, A. (2023) 'KUALITAS PELAYANAN PEMBUATAN PASPOR DI UNIT KERJA IMIGRASI KELAS I TPI BANJARMASIN DI KABUPATEN BALANGAN', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(8), pp. 3233–3241.

Anonim, 2023. *Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penurunan Stunting* di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Agustino Leo. 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung.

Dewi, Rahayu Kusuma. 2016. *Studi Analisis Kebijakan*, Bandung : CV Pustaka Setia

H.Situmorang, Chazali. 2016. *kebijakan publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Kota Depok : CV Khalifah Mediatama

Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi Dan Implementasi kebijakan publik* . Goro: UNG Press Gorontalo.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Cv

Suharsaputra, Uhar. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*

Bandung : PT Refika Aditama
TIM Penyusun STIA, 2022. *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Sarjana Strata 1 (S1)*. Amuntai: STIA

